

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam tesis ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kebijakan kawasan tata ruang pertambangan di Provinsi Jambi mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum nasional. Gubernur berperan strategis memastikan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang, meskipun kewenangan izin berada pada pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan, dan konflik sosial. Revisi RTRW melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023 menjadi langkah penting memperkuat kepastian hukum dan sinkronisasi kebijakan, yang keberhasilannya bergantung pada transparansi, partisipasi publik, serta koordinasi lintas sektor. Tata kelola pertambangan di Jambi perlu diarahkan pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Kebijakan kawasan tata ruang dalam pembangunan pertambangan di Provinsi Jambi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata pemanfaatan ruang yang berorientasi pada pembangunan

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kewenangan perizinan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur Jambi tetap memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan memastikan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang wilayah. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya sinkronisasi antar-instansi, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi publik. Namun, melalui penyesuaian RTRW Provinsi Jambi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis data spasial, kebijakan tata ruang pertambangan dapat lebih efektif mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan kementerian teknis untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan pertambangan. Gubernur perlu mendorong penyempurnaan RTRW agar senantiasa sesuai dengan dinamika kebijakan nasional, terutama dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan dan revisi tata ruang guna meminimalkan potensi konflik sosial dan lingkungan. Penguatan sistem pengawasan

berbasis data spasial yang akurat serta peningkatan kapasitas aparatur daerah juga penting dilakukan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola ruang pertambangan di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan pertambangan dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta kementerian teknis terkait untuk menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Gubernur perlu memperkuat perannya dalam memberikan rekomendasi yang berbasis data dan kajian lingkungan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi publik dan transparansi dalam proses revisi maupun pelaksanaan kebijakan tata ruang harus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan data spasial juga penting dilakukan untuk meminimalisir konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan tata ruang pertambangan di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.